

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGABUNGAN SEKOLAH
DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN
(STUDI KASUS DI SD NEGERI 2 KEBULUSAN KEBUMEN)**



Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)

Disusun oleh:

Ribkhatul Hanifah

NIM: 18104090079

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ribkhatul Hanifah
NIM : 18104090079
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini adalah asli hasil penyusunan peneliti sendiri dan bukan plagiasi karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 18 September 2024

Yang Menyatakan



Ribkhatul Hanifah

NIM. 18104090079

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ribkhatul Hanifah

NIM : 18104090079

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga

Menyatakan dengan ini, saya tidak akan menuntut Program Studi
Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta (atas pemakaian jilbab dalam ijazah strata satu). Seandainya
suatu hari nanti terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut dikarenakan
penggunaan jilbab.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh
kesadaran atas ridha Allah SWT.

Yogyakarta, 19 September 2024

Yang menyatakan,



Ribkhatul Hanifah
NIM. 18104090079

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan pembimbingan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Ribkhatul Hanifah
NIM : 18104090079
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENGGABUNGAN SEKOLAH DALAM
MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN
(STUDI KASUS DI SD NEGERI 2 KEBULUSAN
KEBUMEN)**

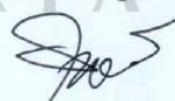
Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.).

Dengan ini kami mengharap agar Skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 September 2024

Pembimbing Skripsi,



Hepu Sulistya, M.Pd.

NIP. 19941021 201903 1 009

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 513056 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-3121/Un.02/DT/PP.00.9/11/2024

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGABUNGAN DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN (STUDI KASUS DI SD NEGERI 2 KEBULUSAN KEBUMEN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIBKHATUL HANIFAH
Nomor Induk Mahasiswa : 18104090079
Telah diujikan pada : Jumat, 01 November 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Heru Sulistya, M.Pd.
SIGNED
Valid ID: 673edbebe4079



Pengaji I
Muhammad Qowim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED
Valid ID: 673eda1c84e8d



Pengaji II
Nora Saiya Jannana, M.Pd.
SIGNED
Valid ID: 673c3cd739e78



Yogyakarta, 01 November 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Prof. Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd.
SIGNED
Valid ID: 673edd3cc5b72

MOTTO

لَا عَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَا أَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِي بِسُلْطَنٍ مُّبِينٍ (٢١)
فَمَكَثَ عَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحْطَثْ بِمَا لَمْ تُحْطِ به وَجْهُنَّكَ مِنْ سَبَّاً بِنَبَّاً يَقِينٍ (٢٢)

Sulaiman memeriksa keadaan burung-burung yang ditundukkan baginya dan keadaan burung yang tidak hadir. Sebelumnya, ada besertanya seekor burung hud-hud yang istimewa lagi dikenal, akan tetapi dia tidak menjumpainya. Maka ia berkata, “Mengapa aku tidak melihat burung hud-hud yang biasa aku lihat? Apakah ada penghalang yang menghalanginya dari (penglihatanku) ataukah ia termasuk yang tidak hadir di hadapanku, sehingga aku tidak bisa melihatnya karena ketidakhadirannya?” Tatkala sudah jelas bahwa ia tidak hadir, Sulaiman berkata, “Sesungguhnya aku akan menyiksanya dengan siksaan yang pedih akibat ketidakhadirannya sebagai sanksi baginya atau aku akan benar-benar menyembelihnya sebagai hukuman atas perbuatannya karena ia tidak tunduk patuh terhadap aturan yang berlaku padanya, atau ia benar-benar datang kepadaku dengan alasan yang jelas yang berisi alasan ketidakhadirannya.”¹

(An-Naml : 21-22)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk

Almamater tercinta

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالَّدِينِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَىٰ أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ آلِهٖ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji syukur kepada Allah SWT. atas segala nikmat dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi di Program Studi (Prodi) Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. yang telah menjadi pemimpin spiritual umat dengan membawa agama Islam sebagai rahmatan lil'alamin.

Pada penulisan skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Penggabungan Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di SD Negeri 2 Kebulusan Kebumen)” tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah mengarahkan peneliti selama mengikuti perkuliahan di prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyan dan Keguruan.
2. Bapak Dr. Zainal Arifin, S.Pd.I, M.S.I selaku Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam yang telah memberikan ilmu dan nasihat untuk menjadi mahasiswa yang kreatif, produktif, dan inovatif selama mengikuti perkuliahan di prodi Manajemen Pendidikan Islam.
3. Ibu Nora Saiva Jannana, M.Pd selaku Sekretaris Prodi Manajemen Pendidikan Islam yang telah memberikan saran, nasihat, dan arahan kepada peneliti selama menjalani perkuliahan di prodi Manajemen Pendidikan Islam.
4. Ibu Dra. Wiji Hidayati, M.Ag selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA) yang telah meluangkan waktu, membimbing, memberi masukan, dan motivasi kepada peneliti.

5. Bapak Heru Sulistya, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah meluangkan waktu, mencurahkan pikiran, dan mengarahkan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan hingga skripsi ini selesai.
6. Segenap dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan atas bantuan dan layanan yang telah diberikan selama peneliti menjalani perkuliahan.
7. Ibu Nur Wahyuni selaku Kepala Sekolah dan segenap guru SD Negeri 2 Kebulusan yang telah memberikan izin penelitian dan mengarahkan dalam pengambilan data kepada peneliti.
8. Kedua orang tua, Bapak Slamet Mujiono dan Ibu Sudarti Esti Purwanti yang selalu mendoakan, sabar, memberi nasihat, dan semangat kepada peneliti. Tidak lupa Kakak Zizah Nurhana dan Sadam Fajar Shodiq yang telah memberikan masukan dan motivasi kepada peneliti.
9. Teman-teman seperjuangan Apta Adhigana di Prodi Manajemen Pendidikan Islam angkatan 2018 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya kepada yang telah memberikan saran dan semangatnya.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT. membalas kebaikan semua pihak dengan pahala dan keberkahan kehidupan, aamiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 September 2024

Peneliti,



Ribkhatul Hanifah

NIM. 18104090079

ABSTRAK

Ribkhatul Hanifah. *Implementasi Kebijakan Penggabungan Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di SD Negeri 2 Kebulusan Kebumen).* Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Latar belakang penelitian ini berangkat dari implementasi kebijakan penggabungan SD Negeri 1 Kebulusan dan SD Negeri 2 Kebulusan. Kedua sekolah mulai menerapkan kebijakan tersebut pada Januari 2020. Nama sekolah yang digunakan SD Negeri 2 Kebulusan. Kedua sekolah merupakan sekolah inpres. SD Negeri 1 Kebulusan sebagai sekolah induk. Lokasi kedua sekolah berada dalam satu komplek dan saling berhadapan. Hal ini akan berdampak pada lingkungan sosial sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi kebijakan penggabungan sekolah di SD Negeri 2 Kebulusan menggunakan teori *Total Quality Management* (TQM) dari Jerome. S. Arcaro.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pemilihan subjek menggunakan teknik *non-probability* yaitu teknik yang tidak memberikan kesempatan yang sama dalam memilih narasumber. Dengan kata lain, peneliti memilih narasumber yang mengetahui, memahami, dan mengalami masalah dalam topik penelitian. Data yang telah terkumpul, peneliti menganalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti dalam memeriksa keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Latar belakang implementasi kebijakan penggabungan sekolah, antara lain: jarak antar sekolah yang saling berdekatan dalam satu wilayah, persaingan yang kurang sehat, dan jumlah peserta didik menurun. (2) Faktor pendukung implementasi kebijakan penggabungan sekolah yaitu sarana dan prasarana yang memadai dan dukungan dari keterlibatan komite sekolah dan tokoh masyarakat. Sedangkan faktor penghambat selama proses implementasi kebijakan, yaitu dari internal sekolah dan orang tua/wali peserta didik SD Negeri 1 Kebulusan dan SD Negeri 2 Kebulusan (3) Dampak Implementasi penggabungan sekolah dalam perspektif *Total Quality Management* (TQM) menurut Jerome S. Arcaro di SD Negeri 2 Kebulusan cukup memuaskan pelanggan. Mulai dari prinsip fokus pada *customer*, keterlibatan total, pengukuran, komitmen, dan perbaikan berkelanjutan, menunjukkan bahwa sekolah ini berkembang cukup baik. Lingkungan sekolah lebih kondusif sehingga sekolah lebih fokus dalam melaksanakan program sekolah. Peningkatan yang terlihat yaitu prestasi sekolah, pemberian sarana prasarana, administrasi sekolah, dan kinerja guru.

Kata Kunci: Penggabungan sekolah, mutu pendidikan

ABSTRACT

Ribkhatul Hanifah. *Implementation of School Merger Policy to Enhance Educational Quality (Case Study at SD Negeri 2 Kebulusan Kebumen).* Thesis. Yogyakarta: Faculty of Islamic Education and Teacher Training, Sunan Kalijaga State Islamic University, 2024.

This study examines the implementation of the policy to merge SD Negeri 1 Kebulusan with SD Negeri 2 Kebulusan. The policy was implemented by both schools in January 2020. The school identified is SD Negeri 2 Kebulusan. Both institutions are designated as presidential instruction schools. SD Negeri 1 Kebulusan serves as the primary institution. The two schools are situated within a single complex and are oriented towards one another. This will affect the school's social environment. This study analyzes the impact of the school merger policy implementation at SD Negeri 2 Kebulusan through the lens of Total Quality Management (TQM) theory as proposed by Jerome S. Arcaro.

This study employs a qualitative research methodology. The data collection method involves interviews, observation, and documentation. The selection of subjects employs a non-probability technique, which does not ensure equal opportunities in the selection of sources. Researchers select sources that possess knowledge, understanding, and experience related to the research topic. The researcher analyzes the collected data through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Researchers utilize source triangulation to verify the validity of data.

The study's results indicate: (1) The context for implementing the school merger policy, which includes: proximity of schools within the same area, unhealthy competition, and a declining student population. Factors that support the implementation of the school merger policy include sufficient facilities and infrastructure, as well as backing from the school committee and community leaders. The inhibiting factors during the policy implementation process originate from within the school and from the parents or guardians of students at SD Negeri 1 Kebulusan and SD Negeri 2 Kebulusan. The implementation of school mergers at SD Negeri 2 Kebulusan, viewed through the lens of Total Quality Management (TQM) as articulated by Jerome S. Arcaro, yields a satisfactory outcome for stakeholders. This school demonstrates significant development by adhering to principles such as customer focus, total involvement, measurement, commitment, and continuous improvement. The school environment is more conducive, allowing for greater focus on the implementation of school programs. Visible improvements include academic achievement, enhancement of facilities and infrastructure, school administration, and teacher performance.

Keywords: School merger, educational quality

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Kajian Penelitian yang Relevan.....	8
E. Kerangka Teori	14
1. Implementasi Kebijakan Penggabungan Sekolah.....	14
2. Mutu Pendidikan.....	21
F. Kerangka Berpikir	28
G. Metode Penelitian	30
1. Jenis Penelitian	30
2. Tempat dan Waktu Penelitian.....	31
3. Subyek Penelitian	31
4. Teknik Pengumpulan Data	32
5. Teknik Analisis Data	34
6. Teknik Keabsahan Data.....	35
H. Sistematika Pembahasan.....	36
BAB II GAMBARAN UMUM.....	38
A. Identitas SD Negeri 2 Kebulusan	38
B. Letak Geografis SD Negeri 2 Kebulusan	39
C. Sejarah SD Negeri 2 Kebulusan	40
D. Visi, Misi, dan Tujuan SD Negeri 2 Kebulusan	42
E. Keadaan Sumber Daya di SD Negeri 2 Kebulusan	43
F. Struktur Organisasi SD Negeri 2 Kebulusan	46

G. Sarana dan Prasarana SD Negeri 2 Kebulusan	47
H. Layanan Kegiatan Ekstrakurikuler SD Negeri 2 Kebulusan	48
I. Prestasi Peserta Didik	49
BAB III IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGABUNGAN SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN (STUDI KASUS DI SD NEGERI 2 KEBULUSAN KEBUMEN).....	51
A. Latar Belakang Implementasi Kebijakan Penggabungan Sekolah di SD Negeri 1 Kebulusan dan SD Negeri 2 Kebulusan	51
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Selama Proses Implementasi Kebijakan Penggabungan Sekolah di SD Negeri 2 Kebulusan.....	56
C. Dampak Implementasi Kebijakan Penggabungan di SD Negeri 2 Kebulusan terhadap Mutu Pendidikan dalam Perspektif <i>Total Quality Management</i> (TQM).....	60
BAB IV PENUTUP.....	74
A. Simpulan	74
B. Saran	76
C. Kata Penutup.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	84

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Keadaan Peserta Didik SD Negeri 2 Kebulusan..... 45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Model Sekolah Bermutu Terpadu	24
Gambar 1. 2. Kerangka Berpikir	30
Gambar 2. 1. Pintu Gerbang SD Negeri 2 Kebulusan.....	38
Gambar 2. 2. Peta Lokasi SD Negeri 2 Kebulusan	39
Gambar 2. 3. Bagan Struktur Organisasi SD Negeri 2 Kebulusan	46



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Instrumen Wawancara
- Lampiran II : Transkip Wawancara
- Lampiran III : Dokumentasi Foto
- Lampiran IV : Data Tenaga Pendidik SD Negeri 2 Kebulusan
Tahun Ajaran 2021/2022
- Lampiran V : Data Tenaga Kependidikan SD Negeri 2 Kebulusan
- Lampiran VI : Prestasi Peserta Didik Sebelum dan Setelah Digabung
- Lampiran VII : Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi
- Lampiran VIII : Surat Bukti Seminar Proposal
- Lampiran IX : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran X : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran XI : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran XII : Surat Keterangan Plagiasi
- Lampiran XIII : Sertifikat PBAK
- Lampiran XIV : Sertifikat SOSPEM
- Lampiran XV : Sertifikat User Education
- Lampiran XVI : Sertifikat PKTQ
- Lampiran XVII : Sertifikat ICT
- Lampiran XVIII : Sertifikat PLP-KKN Integratif
- Lampiran XIX : Sertifikat TOEL
- Lampiran XX : Sertifikat IKLA
- Lampiran XVIII : Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat. Pendidikan mampu membentuk pribadi yang cerdas, dinamis, dan berkarakter. Kualitas pendidikan menjadi salah satu tolak ukur apakah suatu negara sudah maju atau masih berkembang. Pendidikan Indonesia masih perlu dibenahi dengan memaksimalkan fasilitas pendidikan agar tidak tertinggal dengan negara lain.

Berdasarkan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam bidang Pendidikan tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian pendidikan tingkat SD mencapai 97,37%, tingkat SMP 88,88%, dan tingkat SMA 65,94%. Penyelesaian tingkat pendidikan dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga dan kondisi sosial di setiap daerah.² Kualitas dan kuantitas guru di berbagai daerah belum merata. Sehingga setiap sekolah perlu lebih memperhatikan kualifikasi guru. Data dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjelaskan bahwa kualifikasi guru dengan pendidikan SI mencapai 73,17% dan guru yang memiliki sertifikat pendidik sebesar 25,76%.

Pemerataan guru dapat dilakukan dengan adanya kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembangunan pendidikan perlu

² Indra Rahayu Ningsih, “Karakter , Kepemimpinan Dan Kualitas Guru : Kajian Kultur Sekolah Di Indonesia,” *Jurnal Kajian Sosiologi* 13, no. 02 (2024): 201–12.

mempertimbangkan potensi, kekuatan, dan kebutuhan setiap daerah di Indonesia.³

Pemerintahan masa Orde Baru mengeluarkan kebijakan SD Inpres (Instruksi Presiden) berskala nasional atas dasar Instruksi Presiden No. 10 Tahun 1973 dan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1974 yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (BP3K).⁴ Pembangunan gedung SD Inpres dari tahun 1973-1994 berjumlah hampir 150.000 unit di Indonesia. Pembangunan tersebut bertujuan pemerataan pendidikan dasar dalam upaya mewujudkan program wajib belajar bagi anak usia 8 tahun. Pemerintah menempatkan sekitar 1 juta guru di SD Inpres.⁵

Dampak pelaksanaan kebijakan SD Inpres dapat dilihat dari segi kuantitas dan kualitas pendidikan. Dampak SD Inpres dari segi kuantitas mengalami peningkatan, mulai dari pembangunan gedung sampai jumlah peserta didik yang semakin bertambah. Adanya kebijakan SD Inpres, masyarakat dapat menyelesaikan sekolah dasar, angka buta aksara menurun, dan meningkatkan perekonomian negara.⁶ Sedangkan, dari segi kualitas pendidikan yang diberikan masih kurang terutama fasilitas pendidikan yang

³ Ningsih.

⁴ Muhdi Muhdi et al., “Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Di Kabupaten Kendal Menuju Pengelolaan Pendidikan Yang Efisien,” *Warta LPM* 23, no. 2 (2020): 129–40, <https://doi.org/10.23917/warta.v23i2.9911>.

⁵ Erwin Rachmi Puspapertiwi and Farid Firdaus, “Sejarah SD Inpres Yang Dibandingkan Jokowi Dengan Pembangunan IKN,” Kompas.com, 2023, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/06/16/210000165/sejarah-sd-inpres-yang-dibandingkan-jokowi-dengan-pembangunan-ikn?page=all>.

⁶ Rachmi Puspapertiwi and Firdaus.

kurang memadai dan tenaga guru rata-rata lulusan dari Sekolah Pendidikan Guru (SPG) atau setara dengan SMA.⁷

SD Inpres mempengaruhi mutu pendidikan dasar saat ini. Tahun 2019, SD Inpres yang masih berdiri sekitar 6.000 sekolah.⁸ Banyak sekolah yang tutup atau digabung dengan sekolah lain agar kebutuhan pembelajaran dapat terpenuhi. Jumlah penduduk usia pendidikan dasar mengalami penurunan yang berdampak pada jumlah peserta didik di suatu sekolah. Kemudian, pemerintah merancang formulasi kebijakan yang mengacu pada kondisi di lapangan dalam rangka upaya peningkatan mutu pendidikan.

Penggabungan sekolah merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jumlah penduduk usia sekolah dasar yang mengalami penurunan dapat menimbulkan adanya ketimpangan jumlah peserta didik. Ketimpangan yang berkelanjutan menyebabkan munculnya persaingan tidak sehat antar sekolah. Hal demikian juga dapat terjadi di lingkungan sekitar sekolah yang menyebabkan masyarakat menjadi resah. Kejadian ini melatarbelakangi diterapkannya kebijakan penggabungan sekolah.

Penggabungan sekolah diterapkan sejak keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 421.2/2501/Bangda/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan Sekolah, tujuan kebijakan ini adalah untuk pemerataan jumlah guru, efisiensi anggaran pendidikan dan efektivitas pengelolaan pendidikan.

⁷ Panji Hidayat, “Perkembangan SD Inpres Pada Masa Orde Baru Tahun 1973-1983” 2, no. 8 (2016): 9.

⁸ Herry M Joesoef, “SD Inpres, Dulu Dan Kini (Bagian IV-Habis),” Indonesiainside.com, 2019, <https://indonesiainside.id/news/nasional/2019/10/24/sd-inpres-dulu-dan-kini-bagian-iv-habis>.

Kebijakan ini diperjelas dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004, untuk mencapai pemerataan pendidikan dasar, pemerintah melakukan kegiatan pokok diantaranya revitalisasi serta penggabungan sekolah agar mencapai pengelolaan pendidikan yang efisien dan fasilitas yang memadai. Berlakunya kebijakan desentralisasi dalam bidang pendidikan, kabupaten/kota dan provinsi memiliki kebebasan mengatur daerah sendiri sesuai dengan keadaannya masing-masing.⁹

Proses pelaksanaan kebijakan penggabungan sekolah membutuhkan pola manajemen yang tepat untuk dapat mencapai peningkatan mutu pendidikan. Manajemen Mutu Terpadu (MMT) atau *Total Quality Management* (TQM) merupakan penjaminan mutu yang menekankan pengembangan budaya mutu. Jerome S. Arcaro menyatakan bahwa ada lima pilar/prinsip mutu pendidikan yaitu berfokus pada pelanggan, keterlibatan total, pengukuran, komitmen, serta perbaikan berkelanjutan. Pilar/prinsip tersebut didasarkan pada kepercayaan, kepemimpinan, dan kerja sama setiap pihak yang terlibat dalam peningkatan mutu sekolah.¹⁰

Penggabungan sekolah sudah terjadi di beberapa daerah termasuk di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Pada tahun 2019, ada penggabungan di 62 sekolah. Secara umum, penyebab dilakukannya kebijakan ini karena

⁹ Maria Tri Erowati, Slameto Slameto, and Wasitohadi, “Evaluasi Program Regrouping Sekolah Dasar Negeri,” *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan* 5, no. 2 (2018): 152–64, <https://doi.org/10.24246/j.jk.2018.v5.i2.p152-164>.

¹⁰ Jerome S. Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu : Prinsip-Prinsip Perumusan Dan Tata Langkah Penerapan*, 5th ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

kekurangan peserta didik. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Kebumen, terdapat 14 sekolah melakukan penggabungan sekolah lantaran berlokasi di satu komplek gedung sekolah. Selebihnya, penggabungan sekolah dilakukan lantaran jumlah peserta didik yang minim. Penggabungan pada 62 sekolah dilaksanakan mulai awal semester genap yakni pada 1 Januari 2020. Dua sekolah yang menerapkan kebijakan tersebut diantaranya SD Negeri 1 Kebulusan dan SD Negeri 2 Kebulusan.¹¹ SD Negeri 2 Kebulusan termasuk SD Inpres yang mana SD Negeri 1 Kebulusan sebagai sekolah induk. Dua sekolah ini berada pada satu komplek di mana gedung sekolah yang saling berhadapan dan memiliki satu lapangan sekolah yang digunakan secara bergantian. Adanya hal tersebut, dua sekolah dianjurkan menerapkan penggabungan sekolah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

SD Negeri 1 Kebulusan dan SD Negeri 2 Kebulusan sudah cukup lama dikabarkan akan digabung, namun baru terealisasi pada tahun 2020. Romelan Mustofa, S.E., mantan Kepala Desa Kebulusan mengatakan bahwa penggabungan kedua sekolah menjadi jalan terbaik agar tidak ada lagi persaingan, khususnya dalam pencarian peserta didik.¹² Lokasi kedua sekolah yang berada dalam satu komplek akan menimbulkan persaingan yang kurang sehat. Hal tersebut dapat mengganggu kegiatan sekolah khususnya dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Studi pendahuluan tersebut menjadi

¹¹ Kebumen Ekspres, “Minim Siswa, Puluhan SD Di Kebumen Diregroup,” 2020, <https://www.kebumenekspres.com/2020/01/minim-siswa-puluhan-sd-di-kebumen.html>.

¹² Kebumen Ekspres, “Tokoh Masyarakat Minta SDN 1 Dan 2 Kebulusan Diregroup,” accessed January 27, 2024, <https://www.kebumenekspres.com/2017/07/tokoh-masyarakat-minta-sdn-1-dan-2.html>.

daya tarik peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penggabungan Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di SD Negeri 2 Kebulusan Kebumen” menggunakan teori Manajemen Mutu Terpadu (*Total Quality Management*) dari Jerome S. Arcaro dimana terdapat lima pilar utama yang diterapkan di sekolah, yaitu fokus pada pelanggan, keterlibatan penuh total, pengukuran, komitmen, dan perbaikan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang implementasi kebijakan penggabungan sekolah di SD Negeri 1 Kebulusan dan SD Negeri 2 Kebulusan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasi kebijakan penggabungan sekolah di SD Negeri 2 Kebulusan?
3. Bagaimana dampak implementasi kebijakan penggabungan sekolah di SD Negeri 2 Kebulusan terhadap mutu pendidikan perspektif *Total Quality Management* (TQM)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui latar belakang implementasi kebijakan penggabungan sekolah di SD Negeri 2 Kebulusan.
 - b. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasi kebijakan penggabungan sekolah di SD Negeri 2 Kebulusan.

- c. Mengetahui dampak implementasi kebijakan penggabungan sekolah di SD Negeri 2 Kebulusan terhadap mutu pendidikan perspektif *Total Quality Management* (TQM).

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan referensi dan menambah pengetahuan baik bagi lembaga pendidikan, pembaca, dan peneliti mengenai penggabungan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi sekolah, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan sebagai bahan pertimbangan terkait penyelenggaraan pendidikan setelah diterapkannya kebijakan penggabungan sekolah sebagai usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- 2) Bagi peneliti, pelaksanaan penelitian ini dapat menambah informasi, pengetahuan, dan pengalaman mengenai implementasi kebijakan penggabungan sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan pada satuan pendidikan.
- 3) Bagi pembaca, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus sebagai referensi dan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

D. Kajian Penelitian yang Relevan

Dunia pendidikan Indonesia masih sangat diperlukan inovasi baru dalam membentuk sistem dan pengelolaan pendidikan yang baik. Problematika pendidikan Indonesia cukup komplek karena dilihat dari kondisi geografis dan budaya yang berbeda di setiap daerah. Ketimpangan pendidikan terlihat jelas diberbagai daerah baik segi fasilitas, kualitas sumber daya manusia, maupun masyarakat terbilang masih kurang. Pemerintah membuat formulasi kebijakan pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 421.2/2501/Bangda/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan (Regrouping) Sekolah, tujuan kebijakan ini sebagai upaya pemerataan jumlah guru, efisiensi dan anggaran pendidikan dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan ini diterapkan pada dua sekolah atau lebih yang kekurangan jumlah peserta didik, belum terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana sekolah, dan problem lain terkait dengan mutu pendidikan. Mutu pendidikan sudah menjadi sebuah keharusan di setiap satuan pendidikan agar tujuan pembelajaran tercapai dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan terkait penerapan kebijakan penggabungan sekolah di sekolah dasar (SD). Penelitian yang dilakukan Wahdan Najib Habiby, Aninda Tetrasari Z.H, Rofiqoh Maldinni, dkk yang berjudul “Dinamika Merger Sekolah: Antara Pengembangan dan Problem Sekolah” menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa merger (penggabungan) sekolah yang

diterapkan di SD Negeri Sondakan No. 11 Surakarta pada tahun 2015 ini disebabkan oleh kurangnya fasilitas sarana dan prasarana sekolah. SD Negeri Sandokan No.11 mulanya terdiri dari tiga sekolah, yakni SDN Premulung, SDN Sondakan No.11, dan SDN Tegalmulyo. Ketiga sekolah tersebut terletak saling berdekatan dan tidak memiliki halaman sekolah yang memadai. Penggabungan tersebut memberikan dampak positif dan negatif bagi peserta didik. Dampak positif yang dirasakan yakni kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah semakin banyak. Hal tersebut merupakan sumbangsih ide-ide dari guru sehingga peserta didik bisa mengembangkan bakat yang dimilikinya. Kemudian, dampak negatif yang dirasakan oleh peserta didik dan orang tua/wali, adanya kesenjangan strata ekonomi. Beberapa peserta didik merasa dikucilkan sehingga mereka kurang percaya diri.¹³

Kedua, penelitian dari Maria Tri Erowati, Slameto, dan Wasitohadi yang berjudul “Evaluasi Program *Regrouping* Sekolah Dasar Negeri” menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan di SD Negeri Tukang mengungkapkan bahwa penggabungan sekolah sudah mulai diterapkan sebelum keluarnya Surat Keputusan penggabungan dari Bupati. Ada empat faktor pendorong adanya penggabungan sekolah di SD Negeri Tukang 01 dan SD Negeri Tukang 02, antara lain perundang-undangan yang mengatur terkait penggabungan sekolah, jumlah peserta didik yang tidak terpenuhi, kurangnya jumlah tenaga pendidik, dan keadaan lingkungan sekolah

¹³ Wahdan Najib Habiby et al., “Dinamika Merger Sekolah: Antara Pengembangan Dan Problem Sekolah,” *ProfesiPendidikan Dasar* 5, no. 2 (2018): 177–84.

baik internal maupun eksternal. Dampak positif bagi sekolah setelah diterapkannya penggabungan sekolah adalah terpenuhinya jumlah guru dan peserta didik di SD Negeri Tukang, sarana dan prasarana sekolah yang memadai dan prestasi sekolah menjadi meningkat. Penggabungan sekolah juga berdampak negatif, yaitu adanya mutasi guru PNS ke sekolah lain, jam mengajar guru honorer tidak terpenuhi sehingga harus mencari sekolah baru, dan alumni perlu mengeluarkan tenaga, waktu, dan biaya untuk melakukan legalisir ijazah Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang.¹⁴

Ketiga, “Implementasi Kebijakan Regrouping di SD Negeri Cukilan 01 Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang” dilakukan oleh Muntianah, Sunandar, dan Ngurah Ayu Nyoman Murniati ini mendapat beberapa data informasi, di antaranya latar belakang dilaksanakannya penggabungan di SD Negeri Cukilan 01 disebabkan adanya jumlah guru di SD Negeri Cukilan 02 terbilang sedikit yakni 3 guru kelas. Kemudian, jumlah peserta didik tidak memenuhi standar yang seharusnya. Jumlah peserta didik di SD Negeri Cukilan 02 sebanyak 77 peserta didik. Hal itu tidak sesuai dengan batas minimal rombongan belajar sebanyak 20 dan paling banyak 28 peserta didik. SD Negeri Cukilan 01 dan SD Negeri Cukilan 02 cukup berdekatan dengan jarak sekitar 200 m. Selain itu, beberapa ruang kelas di kedua sekolah mengalami kerusakan sehingga lebih efektif apabila dilakukan penggabungan agar anggaran pendidikan bisa digunakan secara maksimal. Sekolah yang

¹⁴ Erowati, Slameto, and Wasitohadi, “Evaluasi Program Regrouping Sekolah Dasar Negeri.”

menerapkan kebijakan ini membutuhkan penyesuaian yang cukup lama karena semua sistem yang telah terbentuk perlu adanya perubahan. Perubahan fisik yang dirasakan sekolah yaitu peningkatan kualitas pembelajaran, penambahan sarana dan prasarana sekolah, dan pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang lebih baik. Kemudian perubahan non-fisik yang terlihat yaitu beban kerja guru menjadi lebih ringan karena terpenuhinya tenaga guru dan iklim kerja menjadi lebih baik sehingga guru dapat bekerja dengan nyaman.¹⁵

Keempat, penelitian Mochammad Handika Attaqwa dengan judul “Implementasi Merger Sekolah di SMKN 12 Surabaya” menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitian terkait judul penelitian tersebut yakni penerapan merger sekolah di SMKN 9 Surabaya dan SMKN 11 Surabaya dilatarbelakangi dengan letak sekolah dalam satu lokasi. Kedua sekolah tersebut memiliki karakteristik yang berbeda tetapi sama-sama berbasis sekolah seni, jumlah peserta didik di SMKN 9 Surabaya lebih sedikit dibanding SMKN 11 Surabaya. Setelah kebijakan ini diterapkan, sekolah menghadapi beberapa kendala seperti sekolah mengalami dinamika sosial di lingkungan sekolah, adanya respon pro dan kontra dari beberapa guru. Kemudian, data Dapodik terkait NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) dan jumlah rombongan belajar yang semakin banyak padahal ada peraturan batasan jumlah romongan belajar. Upaya kepala sekolah dalam mengatasi kendala tersebut yaitu meyakinkan warga sekolah terkait manfaat kebijakan merger

¹⁵ Muntianah, Sunandar, and Ngurah Ayu Nyoman Murniati, “Implementasi Kebijakan Regrouping Di SD Negeri Cukilan 01 Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang,” *Jurnal Manajemen Pendidikan (JMP)* 9, no. 2 (2020): 215–33.

sekolah, melakukan pemberdayaan guru dan pegawai yang bertujuan untuk menstabilkan perubahan yang terjadi.¹⁶

Kelima, penelitian yang berjudul “Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Kendal Menuju Pengelolaan Pendidikan yang Efisien” menggunakan metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian ini dilakukan oleh Muhdi, Nurkolis Siri Kastawi, Yovitha Yuliejantiningsih, dan Sunandar. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan peneliti, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kondisi sekolah dasar negeri di Kabupaten Kendal masih belum merata. Sekolah dalam kategori sangat kecil sebesar 44% dan 27% sekolah kecil. Kemudian, sekolah dalam kategori sangat kecil terdapat 37 sekolah yang jumlah peserta didik kurang dari 60 orang yang mana menjadi prioritas pertama untuk dilakukan penggabungan sekolah. Terdapat 138 sekolah masuk kategori sangat kecil menjadi prioritas kedua karena jumlah peserta didiknya antara 61-90 orang. Selain itu, sekolah dasar di Kabupaten Kendal terjadi kelebihan guru sebesar 73%, guru PNS masih mendominasi dengan pesentase 66% dan 88% guru sekolah dasar negeri telah memenuhi kualifikasi akademik yakni S1 atau D4. Sebanyak 3.250 orang menjadi penerima tunjangan sertifikasi namun diantara jumlah tersebut, 23% belum memenuhi beban mengajar 40 jam per minggu.¹⁷ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan di Kabupaten Kendal belum merata yang

¹⁶ Mochammad Handika Attaqwa, “Implementasi Merger Sekolah Di SMKN 12 Surabaya,” *Manajemen Pendidikan* 00, no. 3 (2018): 1–8.

¹⁷ Muhdi et al., “Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Di Kabupaten Kendal Menuju Pengelolaan Pendidikan Yang Efisien.”

mana terkendala dalam hal jumlah peserta didik dan guru yang tidak sebanding sehingga perlu adanya penggabungan sekolah.

Keenam, penelitian Tita Setiawati dengan judul “Program Penggabungan Sekolah Dasar (SD) dalam Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pendidikan” menggunakan tiga macam pendekatan yang dikemukakan oleh Dunn, meliputi pendekatan empirik, pendekatan evaluatif, dan pendekatan normatif. Tiga pendekatan tersebut dijelaskan dalam buku Willam N, Dunn yang berjudul *An Introduction Public Policy Analysis*. Analisis yang digunakan berkaitan dengan metode analisis kebijakan yang terdiri dari pemantauan (monitoring), perkiraan (forecasting), evaluasi (evaluation), dan rekomendasi (recommendation). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Sekolah Dasar Dewi Sartika 1 mulanya terdiri dari lima sekolah dasar yang kemudian dilakukan penggabungan sekolah. Implementasi kebijakan tersebut dapat meningkatkan pengelolaan sekolah secara efektif dan efisien. Pelayanan dan kegiatan pembelajaran menjadi semakin baik. Peneliti juga mengungkapkan bahwa dalam penggabungan sekolah dasar harus mengetahui terlebih dahulu potensi sekolah dengan memperhatikan aspek kependidikan, teknis bangunan, dan lingkungan sekolah agar tujuan utama dari kebijakan tersebut dalam meningkatkan mutu pendidikan dapat terwujud.¹⁸

¹⁸ Tita Setiawati, “Program Penggabungan Sekolah Dasar (SD) Dalam Meningkatkan Efektivitas Dan Efisiensi Penyelenggaraan Pendidikan,” *MENDIDIK: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pengajaran* 4, no. 1 (2018): 55–62, <https://doi.org/10.30653/003.201841.43>.

Beberapa pemaparan jurnal penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini ditemukan persamaan dan perbedaan mengenai penelitian penggabungan sekolah. Kesamaan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas dengan penelitian ini adalah metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan pembahasan yang diangkat terkait implementasi kebijakan penggabungan sekolah mulai dari faktor-faktor dan dampak yang dirasakan oleh sekolah. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni peneliti menggunakan teori *Total Quality Management* (TQM)/Manajemen Mutu Terpadu (MMT) dari Jerome S. Arcaro yang berfokus pada manajemen sekolah dan kepuasan pelanggan terhadap layanan sekolah setelah diterapkannya kebijakan penggabungan sekolah. Peneliti dapat mengetahui apakah kebijakan tersebut efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pada dasarnya, pihak yang paling merasakan hasil dari kebijakan pendidikan adalah peserta didik dan orang tua.

E. Kerangka Teori

1. Implementasi Kebijakan Penggabungan Sekolah

a. Implementasi

Menurut Nurdin Usman dalam Ali Miftakhu Rosyad:

“Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pembelajaran di Sekolah”, implementasi adalah aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya tahapan suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu rencana kegiatan dalam upaya mencapai tujuan kegiatan.

Implementasi bukan sekedar aktivitas atau pelaksanaan dari sistem, tetapi kegiatan yang dilakukan secara terstruktur sesuai dengan ketentuan untuk tercapainya tujuan kegiatan.¹⁹ Suatu kegiatan tidak dapat berjalan jika tidak ada sumber daya manusia yang berpartisipasi selama proses kegiatan.

Menurut Ripley dan Franklin dalam penelitian Putu Ayu Mira Kusuma Dewi dan I Nyoman Subanda tentang implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kabupaten Buleleng, implementasi adalah sesuatu yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan dengan memberikan kekuasaan program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata.²⁰ Implementasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan setelah undang-undang dibuat oleh pihak yang berwenang dan ditetapkan terkait kewenangan program dan kebijakan. Pengertian implementasi di atas, bisa disimpulkan bahwa implementasi adalah sebuah rangkaian kegiatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan atau norma untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.

b. Kebijakan Penggabungan Sekolah

Penelitian tesis Sarwa Wibawa (2009): “Dampak Penggabungan Sekolah Dasar terhadap Efisiensi, Keefektifan,

¹⁹ Ali Miftakhu Rosyad, “Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pembelajaran Di Sekolah,” *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 5, no. 02 (2019): 173–90, <https://doi.org/10.32678/tarbawi.v5i02.2074>.

²⁰ Putu Ayu Mira Kusuma Dewi and I Nyoman Subanda, “Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Di Kabupaten Buleleng,” *Administrator* 9, no. 1 (2017): 97–113.

Produktivitas, dan Pelayanan Pendidikan di Kabupaten Bantul” menjelaskan bahwa penggabungan sekolah dasar merupakan cara pengembangan sekolah dengan memberdayakan berbagai sumber daya pendidikan untuk mencapai efektivitas pengelolaan sekolah.²¹

Kemudian, Adrian Sutedi dalam Maria Tri Erowati, Slameto, dan Wasitohadi tentang evaluasi program dasar negeri, berpendapat bahwa merger sebagai bentuk penggabungan dua lembaga, lembaga yang satu tetap ada, dan yang satunya lagi ditutup secara hukum, dan nama lembaga yang dipakai adalah lembaga yang eksis/ada.²² Sekolah yang menerapkan kebijakan tersebut dapat saling menutupi kekurangan satu sama lain.

Kepmendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, pasal 23 ayat (1) berbunyi, pengintegrasian sekolah merupakan penggabungan dua atau lebih sekolah sejenis menjadi satu sekolah.²³ Taufiqurokhman melakukan penelitian mengenai implementasi penggabungan sekolah dasar negeri dalam peningkatan mutu pendidikan di Kota Tangerang yang mengungkapkan bahwasannya kebijakan penggabungan sekolah secara efektif dapat meningkatkan mutu pendidikan meskipun sekolah

²¹ Muntianah, Sunandar, and Murniati, “Implementasi Kebijakan Regrouping Di SD Negeri Cukilan 01 Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang.”

²² Erowati, Slameto, and Wasitohadi, “Evaluasi Program Regrouping Sekolah Dasar Negeri.”

²³ Muhdi et al., “Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Di Kabupaten Kendal Menuju Pengelolaan Pendidikan Yang Efisien.”

harus menghadapi berbagai hambatan yang ada.²⁴ Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa penggabungan sekolah adalah penggabungan dua atau lebih sekolah sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan efektivitas sekolah.

c. Implementasi Kebijakan Penggabungan Sekolah

Implementasi penggabungan sekolah mulai diterapkan sejak keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 421.2/2501/Bangda/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan (*Regrouping*) Sekolah. Tujuan kebijakan tersebut adalah untuk mengatasi masalah kurangnya tenaga guru, efisiensi biaya pendidikan, dan peningkatan mutu pendidikan. Berlakunya kebijakan desentralisasi bidang pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mana setiap daerah memiliki kebebasan dalam mengatur daerahnya sesuai dengan kondisi setempat. Kebijakan penggabungan sekolah juga diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, berbunyi bahwa Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan penambahan, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan formal pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar (DIKDAS),

²⁴ Taufiqurokhman, “Implementasi Kebijakan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan Di Kota Tangerang Selatan,” *SPEKTRUM* 14, no. 2 (2017): 301–20.

Pendidikan Menengah (DIKMEN) dan satuan pendidikan nonformal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵

Penggabungan sekolah dilakukan karena tidak efisiennya manajemen sekolah seperti rasio jumlah guru dengan peserta didik tidak seimbang, dan masalah pemerataan guru.²⁶ Mayoritas sekolah yang menerapkan kebijakan ini yaitu disebabkan oleh jumlah peserta didik tidak mencapai standar yang ada. Sebelum melakukan implementasi penggabungan sekolah hal-hal yang perlu diperhatikan, antara lain jumlah guru, jumlah peserta didik, keadaan gedung, letak sekolah, dan kondisi lingkungan sekolah. Semua hal tersebut berkaitan dengan mutu pendidikan yang harus dipenuhi di setiap lembaga pendidikan formal.

d. Tujuan dan Syarat Kebijakan Penggabungan Sekolah

Tujuan utama pemerintah membuat kebijakan penggabungan sekolah adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Selain itu, kebijakan ini dibuat agar lebih efisien dan efektif dalam penyelenggaraan pendidikan baik dari segi sarana dan prasarana, anggaran pendidikan, guru, peserta didik, dan lain-lain. Sekolah yang tidak bisa memenuhi standar minimal pendidikan dalam jangka waktu

²⁵ Erowati, Slameto, and Wasitohadi, “Evaluasi Program Regrouping Sekolah Dasar Negeri.”

²⁶ Teguh Teguh Triwiyanto, “Regrouping of Schools within One Complex and Teacher Redistribution to Attain Equitable Management and Distribution of Teachers” 45 (n.d.), <https://doi.org/10.2991/coema-17.2017.3>.

tertentu, pemerintah setempat akan menerapkan kebijakan penggabungan sekolah.

Mochammad Handika Attaqwa dalam penelitiannya tentang implementasi merger sekolah di SMKN 12 Surabaya, menjelaskan bahwa tujuan adanya penggabungan sekolah, yakni dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekolah dan dapat mengefisiensikan komponen-komponen dalam pengelolaan pendidikan.²⁷ Tujuan penggabungan sekolah memang dinilai lebih efektif dan efisien namun tidak semua sekolah bisa secara tiba-tiba melakukan kebijakan pendidikan ini. Setiap kebijakan pasti ada pertimbangan dan syarat yang harus dipenuhi agar tepat sasaran. Persyaratan penggabungan sekolah tertuang dalam Pasal 24 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah yang berbunyi:

“Pengintegrasian sekolah dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

- Penyelenggaraan sekolah tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
- Jumlah peserta didik tidak memenuhi persyaratan;
- Sekolah yang diintegrasikan harus sesuai jenjang dan jenisnya;
- Jarak antar sekolah yang diintegrasikan saling berdekatan dalam satu wilayah;”

²⁷ Attaqwa, “Implementasi Merger Sekolah Di SMKN 12 Surabaya.”

Beberapa syarat di atas sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan kebijakan penggabungan sekolah. Pihak yang berwenang terkait keputusan kebijakan tersebut yakni dinas pendidikan daerah dibantu oleh pengawas sekolah yang telah ditugaskan dibeberapa kecamatan. Pengawas melakukan pembinaan guru, memantau pemenhuan standar mutu pendidikan, dan melakukan evaluasi terkait pengelolaan pendidikan.

e. Langkah-Langkah Penggabungan Sekolah

Implementasi kebijakan penggabungan sekolah melewati beberapa tahapan untuk memastikan apakah pengelolaan sekolah dapat berjalan dengan baik. Menurut Suparlan (2006), ada lima langkah penggabungan sekolah:

- 1) Mengadakan sosialisasi penggabungan sekolah kepada masyarakat terutama komite sekolah dan pemangku kepentingan (stakeholder). Langkah ini dilakukan agar mereka paham tentang manfaat penggabungan sekolah.
- 2) Membentuk kepanitian yang melibatkan orang-orang yang berkepentingan. Proses pembentukannya dilakukan secara demokratis agar semua pihak terkait dapat berpartisipasi dalam memaksimalkan penyelenggaraan pendidikan.
- 3) Mengajukan program penggabungan sekolah ke dalam program sekolah dinas pendidikan daerah setempat. Langkah ini penting

karena setelah implementasi penggabungan sekolah pasti membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

- 4) Pelaksanaan monitoring program dilakukan oleh stakeholder yang masuk ke dalam kepanitian. Selain itu, pengawas sekolah dan dinas pendidikan daerah terus memantau perkembangan pasca penggabungan sekolah.
- 5) Pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban jika kegiatan itu telah diselesaikan. Langkah ini sangat penting untuk mengetahui apakah kebijakan penggabungan sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan.²⁸

2. Mutu Pendidikan

a. Pengertian Mutu Pendidikan

Menurut Jerome S. Arcaro, mutu adalah “tepat untuk dipakai”. Beliau menegaskan bahwa tujuan utama mutu sekolah adalah mengembangkan program dan layanan pendidikan yang memenuhi kebutuhan pelanggan.²⁹ Kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh sekolah adalah tanah, gedung, guru, dan peserta didik.

Program sekolah juga menjadi dasar terlaksananya kegiatan di sekolah.

²⁸ Suparlan, “Merger Sekolah Dasar, Begitu Perlukah?,” 2006, <https://suparlan.org/189/merger-sekolah-dasar-begitu-perlukah>.

²⁹ M. Sobry, “Proses Penjaminan Mutu Lembaga Pendidikan Islam Melalui Manajemen Mutu Terpadu,” *EL-Hikmah: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2016): 211–22, <https://doi.org/10.20414/elhikmah.v10i2.216>.

Nanang Fattah dalam penelitian M. Sobry tentang proses penjaminan mutu lembaga pendidikan islam melalui manajemen mutu terpadu, mengungkapkan bahwa mutu adalah kemampuan yang dimiliki oleh sebuah jasa pendidikan yang dapat memenuhi harapan peserta didik dan masyarakat sekitar.³⁰ Artinya, mutu merupakan kualitas suatu produk yang mengutamakan kebutuhan pelanggan. Indonesia memiliki standar pendidikan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Usaha untuk memenuhi mutu pendidikan termasuk dalam kegiatan dinamis karena penyelenggaraan pendidikan mengikuti perkembangan zaman. Dengan demikian, mutu pendidikan adalah kualitas pengelolaan pendidikan dengan memenuhi standar pendidikan sehingga terpenuhi kebutuhannya.

b. Manajemen Mutu Pendidikan

Sekolah perlu memiliki strategi manajemen untuk menggerakkan organisasi sekolah. Muncul inovasi sebagai solusi dalam mengatasi persoalan terkait perbaikan mutu atau kualitas pendidikan, diantaranya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan *Total Quality Management* (TQM)/Manajemen Mutu Terpadu (MMT). Kedua pola manajemen diharapkan dapat memberikan perubahan positif terhadap penyelenggaraan pendidikan yang lebih efektif pada tingkat satuan pendidikan.³¹

³⁰ Sobry.

³¹ Hasyim Asy'ari, Zahruddin Zahruddin, and Syipa Fauziah, "Implementasi Prinsip-Prinsip Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Di SMK Ekonomika Depok Jawa Barat,"

Pada pembahasan penelitian ini, peneliti menggunakan pola manajemen *Total Quality Management* (TQM). Berikut pemaparan mengenai konsep *Total Quality Management* (TQM):

1) Pengertian *Total Quality Management* (TQM)

Manajemen Mutu Terpadu (MMT) atau yang dikenal dengan *Total Quality Management* (TQM), sekolah menempatkan peserta didik sebagai “klien” utama. Masukan dan kritikan peserta didik harus disertakan dalam pengambilan keputusan. Apabila sekolah tidak mampu menerapkan sistem demokratis maka pola manajemen mutu terpadu tidak bisa berjalan. Hal tersebut bisa menyebabkan mutu atau kualitas sekolah dikuasai oleh pihak-pihak tertentu yang bersimpangan dengan tujuan utama dari manajemen mutu terpadu.

Menurut Hadari Nawari yang dikutip oleh Tatang Ibrahim dan A. Rusdiana, manajemen mutu terpadu adalah manajemen fungsional dengan pendekatan secara berkelanjutan yang difokuskan pada peningkatan kualitas, agar sesuai dengan standar kualitas dari masyarakat.³² Manajemen mutu terpadu lebih mengutamakan kepuasan pelanggan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Manajemen Mutu Terpadu (MMT) adalah sistem manajemen yang berorientasi pada kualitas

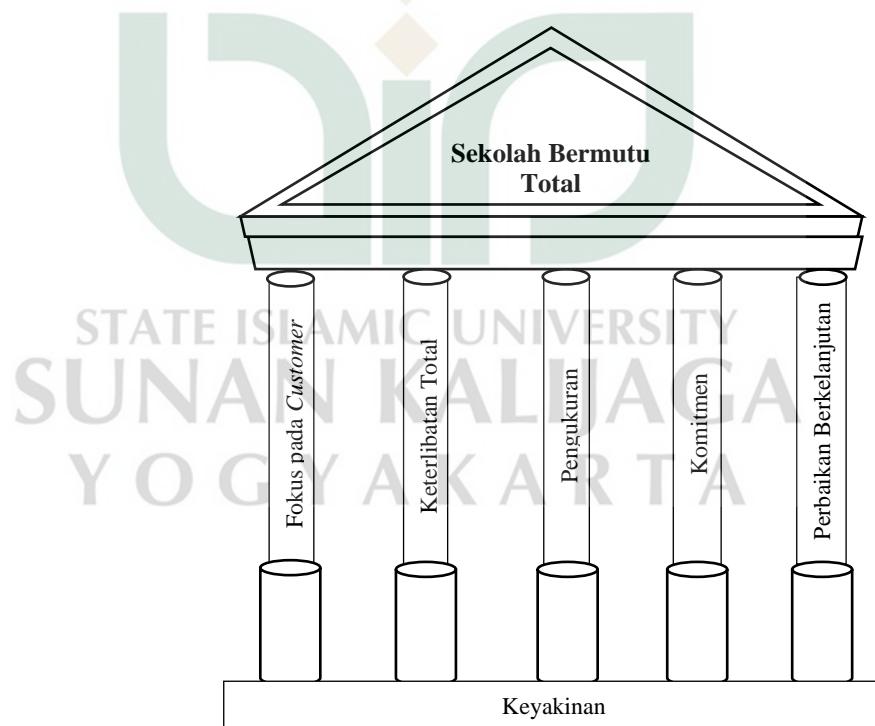
MANAGERIA: *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2017): 205–33, <https://doi.org/10.14421/manageria.2017.22-02>.

³² M.Pd. Dr. H. Tatang Ibrahim and MM Dr. H. A. Rusdiana, Drs., *Manajemen Mutu Terpadu*, ed. Tim Editorial IPS, 1st ed. (Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2021).

pendidikan secara berkelanjutan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan baik dari segi pelayanan dan pembangunan sekolah.

2) Pilar/Prinsip *Total Quality Management* (TQM)

Mutu pendidikan dapat terwujud apabila lingkungan sekolah membuat para guru dan peserta didik dapat menjalankan pekerjaannya dengan maksimal. Setiap sekolah harus memiliki pilar dasar atau prinsip dalam melaksanakan manajemen mutu terpadu. Menurut Jerome S. Arcaro, terdapat 5 prinsip atau pilar untuk mencapai sekolah bermutu terpadu³³, yaitu:



Gambar 1. 1. Model Sekolah Bermutu Terpadu

³³ Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu : Prinsip-Prinsip Perumusan Dan Tata Langkah Penerapan*.

a) Fokus pada *Customer*

Sekolah berfokus pada optimalisasi potensi peserta didik agar mereka merasakan manfaat yang diperoleh selama mengikuti proses pembelajaran di kelas. Sekolah memiliki dua jenis *customer*, antara lain *customer* internal dan *customer* eksternal. *Customer* internal adalah kepala sekolah, guru, staf administrasi, peserta didik, dan orang tua yang ada di dalam sistem lembaga pendidikan. *Customer* eksternal adalah masyarakat, keluarga, lembaga sekolah yang jenjang lebih tinggi.³⁴

b) Keterlibatan Total

Pencapaian mutu dalam satuan pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Setiap orang turut ikut serta dalam mewujudkan mutu pendidikan yang lebih baik. Mutu pendidikan menjadi salah satu kebutuhan bersama yang harus dipenuhi agar semua orang dapat merasakan manfaat dari adanya pendidikan yang bermutu.

c) Pengukuran

Persoalan yang muncul dalam lingkungan seolah menyebabkan organisasi sekolah lebih terpusat dalam pemecahan masalah. Masyarakat belum tentu puas meskipun sarana dan prasarana sekolah sudah memenuhi standar mutu

³⁴ Arcaro.

pendidikan. Pengukuran dalam manajemen mutu terpadu untuk mengetahui seberapa jauh perencanaan telah dilakukan dan mengevaluasi rencana yang telah dilaksanakan.³⁵

d) Komitmen

Semua pihak yang terlibat dalam peningkatan mutu sekolah harus memiliki komitmen pada mutu. Komitmen dapat dibangun dengan merubah atau memperbaiki budaya mutu sebelumnya. Adanya perubahan tersebut, orang menjadi terdorong untuk mendukung transformasi mutu.

e) Perbaikan Berkelanjutan

Selama melakukan transformasi mutu, sekolah perlu melakukan evaluasi program atau kegiatan sebagai bahan pelajaran dalam langkah selanjutnya. Pihak internal sekolah harus konstan dalam menghadapi masalah yang muncul dan terus melakukaaan perbaikan yang berkelanjutan³⁶

3) Karakteristik *Total Quality Management* (TQM)

Menurut Hadari Nawawi, TQM memiliki 10 karakteristik, sebagai berikut:

- a) Fokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal.
- b) Memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas.

³⁵ Endang Safitri, "Implementasi Manajemen Mutu Terpadu Di MTs Negeri 2 Bandar Lampung," *El-Idare: Journal of Islamic Education Management* 7, no. 1 (2021): 11–28.

³⁶ Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu : Prinsip-Prinsip Perumusan Dan Tata Langkah Penerapan*.

- c) Menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah.
- d) Memiliki komitmen jangka panjang.
- e) Membutuhkan kerja sama tim.
- f) Memperbaiki proses secara kesinambungan.
- g) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
- h) Memberikan kebebasan yang terkendali.
- i) Memiliki kesatuan yang terkendali.
- j) Adanya ketelitian dan pemberdayaan karyawan.³⁷

Berdasarkan sepuluh karakteristik di atas, organisasi sekolah yang menerapkan TQM, setiap karyawan harus saling bekerjasama dan memiliki komitmen yang tinggi. Hal tersebut sebagai modal untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan dilakukan secara berkesinambungan.

4) Penerapan TQM di Lembaga Pendidikan

Penerapan TQM di lembaga pendidikan bertujuan untuk memperbaiki manajemen pendidikan yang mana bisa meningkatkan layanan pendidikan sesuai dengan harapan masyarakat. Menurut Nawawi dalam Onisimus Amtu³⁸, TQM dapat dinyatakan berhasil apabila menunjukkan tanda-tanda sebagai berikut:

³⁷ Arbangi, Dakir, and Umiarso, *Manajemen Mutu Pendidikan*, ed. Siti Nursyamsiyah, 2nd ed. (Depok: Prenadamedia Group, 2018).

³⁸ Onisimus Amtu, *Manajemen Pendidikan Di Era Otonomi Daerah (Konsep, Strategi, Dan Implementasi)*, 2nd ed. (Bandung: Alfabeta, 2013).

- a) Pelayanan dan pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan peningkatan kualitas SDM terus meningkat.
- b) Kekeliruan dalam bekerja yang menimbulkan ketidakpuasan dan komplain masyarakat yang dilayani semakin berkurang.
- c) Disiplin waktu dan disiplin kerja semakin meningkat.
- d) Inventarisasi aset organisasi semakin sempurna, terkendali dan tidak berkurang/hilang tanpa diketahui sebab-sebabnya.
- e) Kontrol langsung efektif terutama dari atasan langsung melalui pengawasan melekat, sehingga mampu menghemat pemberian, mencegah penyimpangan dalam pemberian pelayanan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- f) Pemborosan dana dan waktu dalam bekerja dapat dicegah.
- g) Peningkatan keterampilan dan keahlian bekerja terus dilaksanakan sehingga metode atau cara bekerja selalu mampu mengadaptasi perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mutu pendidikan dan pelayanan sekolah terus meningkat.

F. Kerangka Berpikir

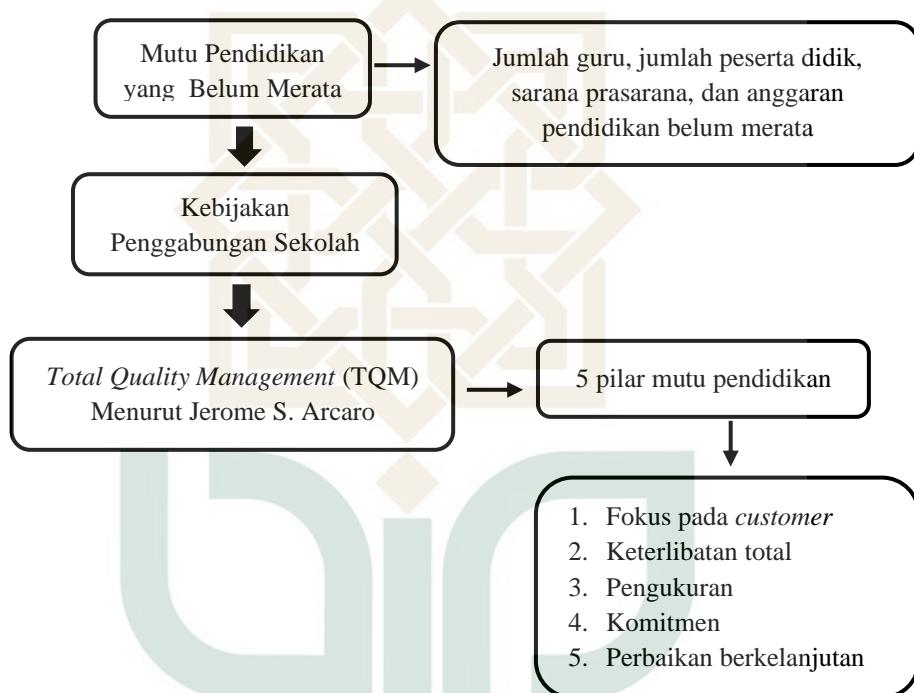
Penelitian ini memaparkan mengenai bagaimana implementasi kebijakan penggabungan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 2 Kebulusan. Permasalahan pendidikan yang sangat komplek,

pemerintah menetapkan sebuah kebijakan penggabungan sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan pada satuan pendidikan. Kebijakan ini sebagai salah satu upaya mengefisiensikan anggaran pendidikan. Dua sekolah berada di satu komplek dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dalam jangka panjang. Kemudian, salah satu sekolah mengalami penurunan jumlah peserta didik maka sangat dianjurkan kedua sekolah tersebut menerapkan penggabungan sekolah. Setelah penerapan kebijakan penggabungan tidak semata-mata permasalahan pengelolaan pendidikan selesai. Permasalahan baru akan muncul selama proses penyesuaian di lingkungan kerja yang baru.

Penggabungan sekolah merupakan penggabungan dua sekolah yang mempunyai visi, misi, dan budaya yang berbeda. Kepala sekolah sebisa mungkin terus memantau kinerja para guru karena perbedaan budaya akan mempengaruhi hasil kinerja. Sehingga, setiap warga sekolah membutuhkan waktu untuk beradaptasi di lingkungan kerja yang baru. Pemecahan masalah tersebut dapat melalui musyawarah pihak internal sekolah untuk menyusun strategi manajemen baru agar kualitas pendidikan semakin meningkat.

Penelitian ini menggunakan teori *Total Quality Management* (TQM)/Manajemen Mutu Terpadu (MMT). Pola manajemen TQM lebih berfokus pada kepuasan pelanggan (orang tua dan peserta didik) sehingga mereka bisa menilai tingkat kualitas pendidikan pada suatu sekolah. Dengan kata lain, mutu pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Namun, sering terjadi perbedaan maksud dan tujuan antara pihak sekolah dan masyarakat. Kemudian, sebagai kepala sekolah perlu bergerak cepat tapi pasti

dalam menangani kendala yang ada. Menurut Jerome S. Arcaro terdapat lima pilar/prinsip pada *Total Quality Management* (TQM) yang meliputi fokus pada *costumer*, keterlibatan total, pengukuran, komitmen, dan perbaikan berkelanjutan. Menurut pemaparan di atas, dapat digambarkan kerangka berpikir sebagai berikut:



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Gambar 1. 2. Kerangka Berpikir

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung untuk melihat fenomenon yang ada di lapangan sehingga peneliti memperoleh data yang valid dan detail. Selama melakukan pengamatan, peneliti membuat catatan lapangan.

Menurut Bogdan dan Taylor dalam I Wayan Suwendra tentang metodologi penelitian kualitatif³⁹, metodologi kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan berasal dari wawancara dan perilaku yang dapat diamati. Oleh karena itu, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif agar memperoleh data yang valid dan detail sesuai hasil penelitian dengan judul penelitian yang diambil.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 2 Kebulusan yang beralamat Jalan Raya Kebulusan KM 05, Kebulusan, Pejagoan, Kebumen. Adapun waktu pelaksanaan penelitian pada Februari 2022 sampai 10 Maret 2023.

3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang yang akan memberikan informasi kepada peneliti. Sebagai peneliti hendaknya memiliki data awal sebelum terjun ke lapangan agar dapat menentukan subyek penelitian dengan tepat.

Peneliti menggunakan teknik *non-probability* dalam memilih subjek penelitian. Subjek dalam penelitian kualitatif hendaknya orang yang mengetahui, memahami dan mengalami masalah dalam topik penelitian.

Peneliti menggunakan teknik *non-probability* karena peneliti

³⁹ I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, Dan Keagamaan*, ed. I.B Arya Lawa Manuaba, NilaCakra Publishing House, Bandung, 1st ed. (Bandung: Nilacakra, 2018), yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf.

membutuhkan informasi secara detail dan data yang valid. Subjek penelitian pada penelitian ini yaitu kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan orang tua/wali peserta didik di SD Negeri 2 Kebulusan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a) Observasi

Menurut Usman dan Purnomo dalam Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, dkk tentang metode penelitian kualitatif dan kuantitatif⁴⁰, Observasi ialah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena yang diteliti. Artinya, observasi tidak hanya sekedar melihat kejadian melainkan juga mengamati secara sistematis dan membuat catatan. Peneliti menggunakan jenis observasi non-partisipan yang mana peneliti tidak ikut secara aktif dalam kegiatan. Langkah peneliti pada pelaksanaan observasi yakni dengan mengamati dan mencatat keadaan di lingkungan sekolah baik dari segi sarana dan prasarana, proses pembelajaran, dan interaksi antar warga sekolah setelah adanya implementasi penggabungan sekolah di SD Negeri 2 Kebulusan.

⁴⁰ Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, ed. Husnu Abadi, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020).

b) Wawancara

Menurut Nazir dalam Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, dkk, wawancara adalah proses memperoleh informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).⁴¹ Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara mendalam (*indept interview*) terkait penerapan kebijakan penggabungan sekolah di SD Negeri 2 Kebulusan. Sebelum wawancara, peneliti menyiapkan daftar pertanyaan seputar tema penelitian dan memilih narasumber yang tepat. Selama proses wawancara, peneliti sebisa mungkin memahami situasi dan dapat mencairkan suasana agar narasumber merasa nyaman sehingga memperoleh data secara detail dan valid.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen yang diperlukan sebagai pendukung dalam pembuktian penelitian. Sugiyono dalam Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, dkk⁴², mengungkapkan bahwa dokumen bisa dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya dari seseorang. Peneliti mengumpulkan dokumentasi berupa dokumen tertulis, dokumen elektronik, dan gambar. Bentuk dokumentasi tersebut sebagai

⁴¹ Hardani et al.

⁴² Hardani et al.

pendukung hasil penelitian ini mengenai implementasi kebijakan penggabungan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 2 Kebulusan Kebumen.

5. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman. Ada tiga macam dalam menganalisis data⁴³, yaitu:

a) Reduksi Data

Menurut Riyanto, mereduksi data berarti menyederhanakan data dan dipilih mana yang menjadi tujuan penelitian. Kegiatan reduksi data mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian di tahap selanjutnya. Selama mereduksi data, peneliti berorientasi pada tujuan penelitian agar apa yang menjadi fokus penelitian bisa tercapai.

b) Penyajian Data (*Data Display*)

Bentuk penyajian data dalam penelitian kualitatif yakni penjelasan singkat, bagan, dan sejenisnya.⁴⁴ Data *display* (penyajian data) memudahkan peneliti dalam memahami data-data yang diperoleh dan melakukan tahap penelitian selanjutnya.

⁴³ Hardani et al.

⁴⁴ Umar Shidiq and Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, ed. M.Ag Dr. Anwar Mujahidin, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 1st ed., vol. 53 (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), <http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf>.

c) Penarikan Simpulan/Verifikasi

Kesimpulan awal dalam penelitian masih bersifat sementara dan dapat berubah ketika peneliti kembali ke lapangan. Kemudian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif bisa saja dapat menjawab rumusan masalah dan bisa juga tidak. Sebab, rumusan masalah penelitian masih bersifat sementara yang mana dapat berkembang setelah peneliti terjun ke lapangan.

6. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi. Triangulasi dalam uji kredibilitas didefinisikan sebagai pengecekan data terhadap data yang diperoleh selama di lapangan. Peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber melakukan pengecekan data dari berbagai sumber yang mana dalam penelitian kualitatif tidak bisa hanya satu sumber saja tetapi juga sumber lain. Untuk itu, peneliti dapat mengkategorisasikan data dan menghasilkan kesimpulan sesuai dengan kesepakatan berdasarkan sumber-sumber tersebut.⁴⁵

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 17th ed. (Bandung: Alfabeta, 2013).

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memberikan gambaran keseluruhan dalam untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini. Sistematika pembahasan dalam skripsi dibagi menjadi lima bab, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan kerangka berpikir. Latar belakang berisi terkait alasan peneliti dalam pengambilan judul penelitian ini. Rumusan masalah berisi beberapa pertanyaan yang menjadi pokok pembahasan dalam hasil penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian berisi tujuan dilakukannya penelitian ini dan manfaat berisi kegunaan yang akan diperoleh baik bagi peneliti dan pembaca. Kajian pustaka memuat beberapa artikel ilmiah yang relevan dengan tema penelitian yang diangkat. Kerangka berpikir berisi penjelasan bagaimana hubungan antar variabel yang akan diteliti. Metode penelitian mencakup beberapa hal, meliputi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan yang terakhir teknik keabsahan data. Kemudian, sistematika pembahasan berisi gambaran keseluruhan dari penelitian ini.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Pada bab ini membahas gambaran umum SD Negeri 2 Kebulusan Kebumen mengenai identitas sekolah, letak geografis sekolah, sejarah sekolah, visi dan misi, struktur organisasi sekolah dan apa aja yang berkaitan situasi dan kondisi sekolah pada saat ini.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi pembahasan hasil penelitian berdasarkan beberapa pertanyaan dalam rumusan masalah terkait implementasi kebijakan penggabungan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 2 Kebulusan.

BAB IV : PENUTUP

Bagian ini berisi kesimpulan dan saran terkait pembahasan penelitian.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Penggabungan Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di SD Negeri 2 Kebulusan Kebumen), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan penggabungan sekolah di SD Negeri 2 Kebulusan dilatarbelakangi oleh lokasi SD Negeri 1 Kebulusan dan SD Negeri 2 Kebulusan saling berdekatan yang berdampak pada lingkungan sosial yang kurang sehat. Persaingan yang kurang sehat dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menyebabkan turunnya jumlah peserta didik di SD Negeri 1 Kebulusan. Saat itu, manajemen sekolah sempat mengalami penurunan.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Selama Proses Implementasi Kebijakan Penggabungan Sekolah di SD Negeri 2 Kebulusan
 - a. Faktor pendukung implementasi kebijakan penggabungan sekolah ada 2, yaitu (1) Sarana prasarana SD Negeri 1 Kebulusan dan SD Negeri 2 Kebulusan yang memadai (2) Dukungan dari keterlibatan komite sekolah dan tokoh masyarakat. Dukungan dalam bentuk keterlibatan selama proses implementasi kebijakan penggabungan sekolah.

- b. Faktor penghambat implementasi kebijakan penggabungan sekolah ada 2, yaitu (1) Internal sekolah, rasa canggung diantara kedua sekolah selama proses implementasi kebijakan. (2) Orang tua/wali peserta didik, pro dan kontra terkait nama sekolah pasca penggabungan.
3. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, implementasi kebijakan penggabungan sekolah dalam perspektif *Total Quality Management* (TQM) cukup memuaskan pelanggan SD Negeri 2 Kebulusan. Prinsip *Total Quality Management* meliputi: 1) Fokus pada *customer*. Sekolah lebih fokus dalam meningkatkan mutu pendidikan sesuai kebutuhan pelanggan. Prestasi sekolah menjadi meningkat.; 2) Keterlibatan total. Kepala sekolah, guru, staf, dan komite sekolah saling bekerja sama dalam setiap program sekolah. Orang tua/wali peserta didik dan peserta didik cukup antusias mendukung program sekolah.; 3) Pengukuran. Kinerja kepala sekolah dan guru terus mengalami peningkatan.; 4) Komitmen. Kepala sekolah memiliki komitmen yang lebih kuat demi perkembangan mutu sekolah. Guru dan staf saling mendukung dan memotivasi dalam bekerja.; 5) Perbaikan berkelanjutan. Setelah penggabungan sekolah, lingkungan sosial sekolah lebih kondusif. Program sekolah semakin berkembang pesat dan prestasi sekolah semakin meningkat.

B. Saran

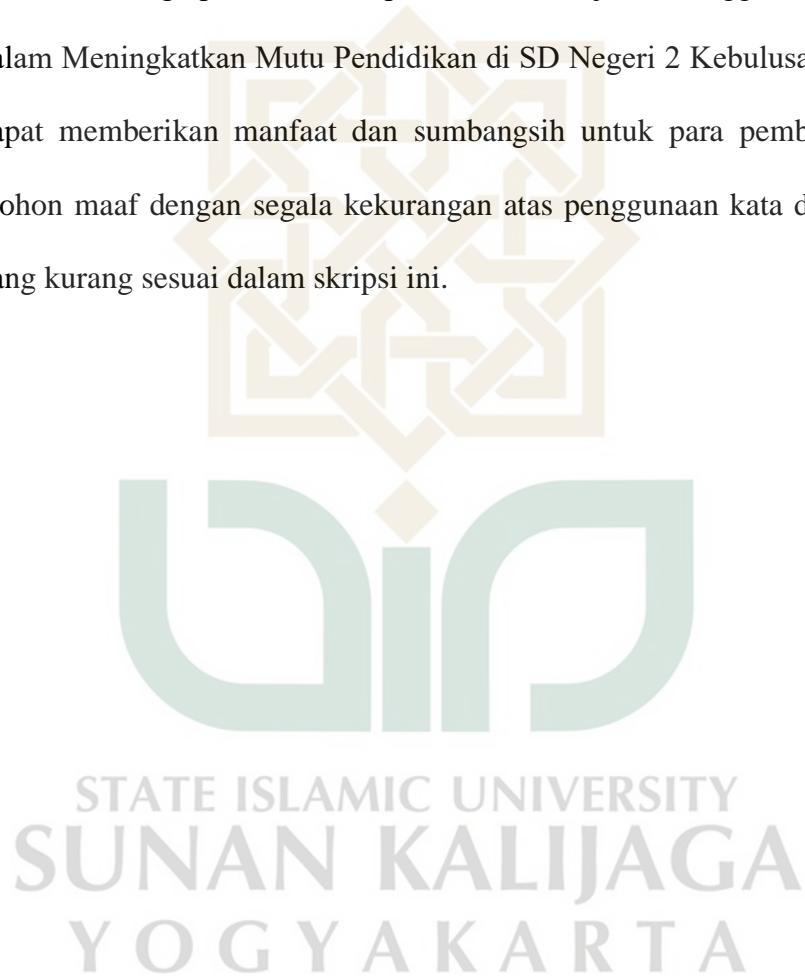
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut saran yang peneliti berikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam mengimplementasikan kebijakan penggabungan sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 2 Kebulusan:

1. Kepala sekolah sebagai pemegang kendali kebijakan di sekolah agar dapat meningkatkan pengawasan, komunikasi, dan kerja sama dengan guru, komite sekolah, dan orang tua/wali peserta didik. Kemudian, guru selaku tenaga pendidik diharapkan dapat bekerja sama dengan baik, memberikan pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku, dan pelayanan terbaik kepada peserta didik dan orang tua/wali peserta didik.
2. Komite sekolah sebagai perantara masyarakat dalam menyampaikan kritik dan masukan kepada pihak sekolah diharapkan dapat mempertahankan sikap netral dan memberikan masukan demi perkembangan manajemen mutu pendidikan di SD Negeri 2 Kebulusan.
3. Orang tua/wali peserta didik sebagai *customer* sekolah dapat menyampaikan kritik dan saran terhadap kebijakan sekolah. Orang tua/wali peserta didik diharapkan selalu mendukung kebijakan sekolah yang nantinya akan memberikan timbal balik untuk anak-anak mereka.
4. Penelitian ini tentu masih banyak kekurangan sehingga perlu dikembangkan lagi. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengkaji implementasi kebijakan penggabungan sekolah dalam

meningkatkan mutu pendidikan yang berorientasi pada kepuasaan pelanggan.

C. Kata Penutup

Semoga penelitian “Implementasi Kebijakan Penggabungan Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SD Negeri 2 Kebulusan Kebumen” dapat memberikan manfaat dan sumbangsih untuk para pembaca. Peneliti mohon maaf dengan segala kekurangan atas penggunaan kata dan penulisan yang kurang sesuai dalam skripsi ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Amtu, Onisimus. *Manajemen Pendidikan Di Era Otonomi Daerah (Konsep, Strategi, Dan Implementasi)*. 2nd ed. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Arbangi, Dakir, and Umiarso. *Manajemen Mutu Pendidikan*. Edited by Siti Nursyamsiyah. 2nd ed. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Arcaro, Jerome S. *Pendidikan Berbasis Mutu : Prinsip-Prinsip Perumusan Dan Tata Langkah Penerapan*. 5th ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Asy'ari, Hasyim, Zahruddin Zahruddin, and Syipa Fauziah. "Implementasi Prinsip-Prinsip Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Di SMK Ekonomika Depok Jawa Barat." *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2017): 205–33. <https://doi.org/10.14421/manageria.2017.22-02>.
- Attaqwa, Mochammad Handika. "Implementasi Merger Sekolah Di SMKN 12 Surabaya." *Manajemen Pendidikan* 00, no. 3 (2018): 1–8.
- Dewi, Putu Ayu Mira Kusuma, and I Nyoman Subanda. "Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Di Kabupaten Buleleng." *Administrator* 9, no. 1 (2017): 97–113.
- Dr. H. Tatang Ibrahim, M.Pd., and MM Dr. H. A. Rusdiana, Drs. *Manajemen Mutu Terpadu*. Edited by Tim Editorial IPS. 1st ed. Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2021.
- Ekspres, Kebumen. "Minim Siswa, Puluhan SD Di Kebumen Diregroup," 2020. <https://www.kebumenekspres.com/2020/01/minim-siswa-puluhan-sd-di-kebumen.html>.
- . "Tokoh Masyarakat Minta SDN 1 Dan 2 Kebulusan Diregroup." Accessed January 27, 2024. <https://www.kebumenekspres.com/2017/07/tokoh-masyarakat-minta-sdn-1-dan-2.html>.
- Erowati, Maria Tri, Slameto Slameto, and Wasitohadi. "Evaluasi Program Regrouping Sekolah Dasar Negeri." *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan* 5, no. 2 (2018): 152–64. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2018.v5.i2.p152-164>.
- Habiby, Wahdan Najib, Aninda Tetrasari Z.H, Rofiqoh Maldinni, Ita Noer Prawiti, Fitri Nur Wulandari, and Qorin Umdatul Millah. "Dinamika Merger Sekolah:

- Antara Pengembangan Dan Problem Sekolah.” *ProfesiPendidikan Dasar* 5, no. 2 (2018): 177–84.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, and Ria Rahmatul Istiqomah. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Edited by Husnu Abadi. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Hidayat, Panji. “Perkembangan SD Inpres Pada Masa Orde Baru Tahun 1973–1983” 2, no. 8 (2016): 9.
- Joesoef, Herry M. “SD Inpres, Dulu Dan Kini (Bagian IV-Habis).” [Indonesiainside.com](https://indonesiainside.id/news/nasional/2019/10/24/sd-inpres-dulu-dan-kini-bagian-iv-habis), 2019.
- <https://indonesiainside.id/news/nasional/2019/10/24/sd-inpres-dulu-dan-kini-bagian-iv-habis>.
- Muhdi, Muhdi, Nurkolis Siri Kastawi, Yovitha Yuliejantiningsih, and Sunandar Sunandar. “Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Di Kabupaten Kendal Menuju Pengelolaan Pendidikan Yang Efisien.” *Warta LPM* 23, no. 2 (2020): 129–40. <https://doi.org/10.23917/warta.v23i2.9911>.
- Muntianah, Sunandar, and Ngurah Ayu Nyoman Murniati. “Implementasi Kebijakan Regrouping Di SD Negeri Cukilan 01 Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang.” *Jurnal Manajemen Pendidikan (JMP)* 9, no. 2 (2020): 215–33.
- Ningsih, Indra Rahayu. “Karakter , Kepemimpinan Dan Kualitas Guru : Kajian Kultur Sekolah Di Indonesia.” *Jurnal Kajian Sosiologi* 13, no. 02 (2024): 201–12.
- Rachmi Puspapertiwi, Erwin, and Farid Firdaus. “Sejarah SD Inpres Yang Dibandingkan Jokowi Dengan Pembangunan IKN.” [Kompas.com](https://www.kompas.com/tren/read/2023/06/16/210000165/sejarah-sd-inpres-yang-dibandingkan-jokowi-dengan-pembangunan-ikn?page=all), 2023.
- <https://www.kompas.com/tren/read/2023/06/16/210000165/sejarah-sd-inpres-yang-dibandingkan-jokowi-dengan-pembangunan-ikn?page=all>.
- Rosyad, Ali Miftakhu. “Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pembelajaran Di Sekolah.” *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 5, no. 02 (2019): 173–90.
- <https://doi.org/10.32678/tarbawi.v5i02.2074>.
- Safitri, Endang. “Implementasi Manajemen Mutu Terpadu Di MTs Negeri 2 Bandar

- Lampung.” *El-Idare: Journal of Islamic Education Management* 7, no. 1 (2021): 11–28.
- Setiawati, Tita. “Program Penggabungan Sekolah Dasar (SD) Dalam Meningkatkan Efektivitas Dan Efisiensi Penyelenggaraan Pendidikan.” *MENDIDIK: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pengajaran* 4, no. 1 (2018): 55–62. <https://doi.org/10.30653/003.201841.43>.
- Shidiq, Umar, and Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Edited by M.Ag Dr. Anwar Mujahidin. *Journal of Chemical Information and Modeling*. 1st ed. Vol. 53. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019. http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE_PENELITIAN_KUALITATIF_DI_BIDANG_PENDIDIKAN.pdf.
- Sobry, M. “Proses Penjaminan Mutu Lembaga Pendidikan Islam Melalui Manajemen Mutu Terpadu.” *EL-Hikmah: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2016): 211–22. <https://doi.org/10.20414/elhikmah.v10i2.216>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 17th ed. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suparlan. “Merger Sekolah Dasar, Begitu Perlukah?,” 2006. <https://suparlan.org/189/merger-sekolah-dasar-begitu-perlukah>.
- Suwendra, I Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, Dan Keagamaan*. Edited by I.B Arya Lawa Manuaba. *NilaCakra Publishing House*, Bandung. 1st ed. Bandung: Nilacakra, 2018. yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf.
- Taufiqurokhman. “Implementasi Kebijakan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan Di Kota Tangerang Selatan.” *SPEKTRUM* 14, no. 2 (2017): 301–20.
- Teguh Triwiyanto, Teguh. “Regrouping of Schools within One Complex and Teacher Redistribution to Attain Equitable Management and Distribution of Teachers” 45 (n.d.). <https://doi.org/10.2991/coema-17.2017.3>.
- Amtu, Onisimus. *Manajemen Pendidikan Di Era Otonomi Daerah (Konsep*,

- Strategi, Dan Implementasi). 2nd ed. Bandung: Alfabeta, 2013.*
- Arbangi, Dakir, and Umiarso. *Manajemen Mutu Pendidikan*. Edited by Siti Nursyamsiyah. 2nd ed. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Arcaro, Jerome S. *Pendidikan Berbasis Mutu : Prinsip-Prinsip Perumusan Dan Tata Langkah Penerapan*). 5th ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Asy'ari, Hasyim, Zahruddin Zahruddin, and Syipa Fauziah. "Implementasi Prinsip-Prinsip Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Di SMK Ekonomika Depok Jawa Barat." *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2017): 205–33. <https://doi.org/10.14421/manageria.2017.22-02>.
- Attaqwa, Mochammad Handika. "Implementasi Merger Sekolah Di SMKN 12 Surabaya." *Manajemen Pendidikan* 00, no. 3 (2018): 1–8.
- Dewi, Putu Ayu Mira Kusuma, and I Nyoman Subanda. "Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Di Kabupaten Buleleng." *Administrator* 9, no. 1 (2017): 97–113.
- Dr. H. Tatang Ibrahim, M.Pd., and MM Dr. H. A. Rusdiana, Drs. *Manajemen Mutu Terpadu*. Edited by Tim Editorial IPS. 1st ed. Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2021.
- Ekspres, Kebumen. "Minim Siswa, Puluhan SD Di Kebumen Diregroup," 2020. <https://www.kebumenekspres.com/2020/01/minim-siswa-puluhan-sd-di-kebumen.html>.
- . "Tokoh Masyarakat Minta SDN 1 Dan 2 Kebulusan Diregroup." Accessed January 27, 2024. <https://www.kebumenekspres.com/2017/07/tokoh-masyarakat-minta-sdn-1-dan-2.html>.
- Erowati, Maria Tri, Slameto Slameto, and Wasitohadi. "Evaluasi Program Regrouping Sekolah Dasar Negeri." *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan* 5, no. 2 (2018): 152–64. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2018.v5.i2.p152-164>.
- Habiby, Wahdan Najib, Aninda Tetrasari Z.H, Rofiqoh Maldinni, Ita Noer Prawiti, Fitri Nur Wulandari, and Qorin Umdatul Millah. "Dinamika Merger Sekolah: Antara Pengembangan Dan Problem Sekolah." *ProfesiPendidikan Dasar* 5, no. 2 (2018): 177–84.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari

- Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, and Ria Rahmatul Istiqomah. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Edited by Husnu Abadi. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Hidayat, Panji. "Perkembangan SD Inpres Pada Masa Orde Baru Tahun 1973-1983" 2, no. 8 (2016): 9.
- Joesoef, Herry M. "SD Inpres, Dulu Dan Kini (Bagian IV-Habis)." [Indonesiainside.com](https://indonesiainside.id/news/nasional/2019/10/24/sd-inpres-dulu-dan-kini-bagian-iv-habis), 2019. <https://indonesiainside.id/news/nasional/2019/10/24/sd-inpres-dulu-dan-kini-bagian-iv-habis>.
- Muhdi, Muhdi, Nurkolis Siri Kastawi, Yovitha Yuliejantiningsih, and Sunandar Sunandar. "Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Di Kabupaten Kendal Menuju Pengelolaan Pendidikan Yang Efisien." *Warta LPM* 23, no. 2 (2020): 129–40. <https://doi.org/10.23917/warta.v23i2.9911>.
- Muntianah, Sunandar, and Ngurah Ayu Nyoman Murniati. "Implementasi Kebijakan Regrouping Di SD Negeri Cukilan 01 Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang." *Jurnal Manajemen Pendidikan (JMP)* 9, no. 2 (2020): 215–33.
- Ningsih, Indra Rahayu. "Karakter , Kepemimpinan Dan Kualitas Guru : Kajian Kultur Sekolah Di Indonesia." *Jurnal Kajian Sosiologi* 13, no. 02 (2024): 201–12.
- Rachmi Puspapertiwi, Erwin, and Farid Firdaus. "Sejarah SD Inpres Yang Dibandingkan Jokowi Dengan Pembangunan IKN." [Kompas.com](https://www.kompas.com/tren/read/2023/06/16/210000165/sejarah-sd-inpres-yang-dibandingkan-jokowi-dengan-pembangunan-ikn?page=all), 2023. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/06/16/210000165/sejarah-sd-inpres-yang-dibandingkan-jokowi-dengan-pembangunan-ikn?page=all>.
- Rosyad, Ali Miftakhu. "Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pembelajaran Di Sekolah." *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 5, no. 02 (2019): 173–90. <https://doi.org/10.32678/tarbawi.v5i02.2074>.
- Safitri, Endang. "Implementasi Manajemen Mutu Terpadu Di MTs Negeri 2 Bandar Lampung." *El-Idare: Journal of Islamic Education Management* 7, no. 1 (2021): 11–28.
- Setiawati, Tita. "Program Penggabungan Sekolah Dasar (SD) Dalam Meningkatkan

- Efektivitas Dan Efisiensi Penyelenggaraan Pendidikan.” *MENDIDIK: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pengajaran* 4, no. 1 (2018): 55–62. <https://doi.org/10.30653/003.201841.43>.
- Shidiq, Umar, and Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Edited by M.Ag Dr. Anwar Mujahidin. *Journal of Chemical Information and Modeling*. 1st ed. Vol. 53. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019. http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE_PENELITIAN_KUALITATIF_DI_BIDANG_PENDIDIKAN.pdf.
- Sobry, M. “Proses Penjaminan Mutu Lembaga Pendidikan Islam Melalui Manajemen Mutu Terpadu.” *EL-Hikmah: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2016): 211–22. <https://doi.org/10.20414/elhikmah.v10i2.216>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 17th ed. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suparlan. “Merger Sekolah Dasar, Begitu Perlukah?,” 2006. <https://suparlan.org/189/merger-sekolah-dasar-begitu-perlukah>.
- Suwendra, I Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, Dan Keagamaan*. Edited by I.B Arya Lawa Manuaba. *NilaCakra Publishing House, Bandung*. 1st ed. Bandung: Nilacakra, 2018. yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf.
- Taufiqurokhman. “Implementasi Kebijakan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan Di Kota Tangerang Selatan.” *SPEKTRUM* 14, no. 2 (2017): 301–20.
- Teguh Triwiyanto, Teguh. “Regrouping of Schools within One Complex and Teacher Redistribution to Attain Equitable Management and Distribution of Teachers” 45 (n.d.). <https://doi.org/10.2991/coema-17.2017.3>.